**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Aspirasi ummat Islam diartikulasikan baik melalui jalur politik maupun non politik. Sebelum dan diawal periode orde baru, terdapat kecenderungan yang kuat dikalangan para pemimpin muslim bergabung dalam kancah poltik, sehingga mereka mengidetifikasikan perjuangan Islam dengan partai politik Islam.[[1]](#footnote-2) Dari awal sebelum kemerdekaan pergulatan politik di Indonesia tidaklah terlepas dari peran dan campur tangan para kiai. Bila di telusuri hubungan politik antara para ulama dan pemerinahan sudah terjadi sejak awal masuknya Islam ke Indonesia yakni di zaman kerajaan Hindu Budha. Dalam hal ini dilakukan oleh para wali yang menyebar luaskan agama Islam melalui diplomasi politik dengan raja-raja di zaman kerajaan Hindu Budha, sampai akhirnya umat Islam mendirikan kerajaan Islam sendiri.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, Islam dan umatnya telah menunjukkan peranannya yang signifikan dalam usahanya yang membebaskan bangsa ini dari imperialisme Eropa. Peranan politik umat Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia menjadi bangsa merdeka, kita mengetahui para kiai dan ulama pada awal dekade 1900-an menyerukan pencerahan dan pencerdasan anak bangsa (masyarakat pribumi). Disamping itu munculnya kelahiran Serekat Dagang Islam (SDI) yang dipelopori oleh kelompok kecil umat Islam diantaranya Tamar Djaja dan Samanhoedji pada 16 Oktober 1905 yang disusul oleh Sarekat Islam (SI) berdiri pada 11 November 1912 merupakan bentuk kebangkitan bangsa terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.[[2]](#footnote-3)

Sedangkan Pada tahun 1914, dimana awal tahun ini ada gagasan dari pemuda jombang yang tinggal di Surabaya, yang awalnya sepulang dari mekah menggagas pergerakan dengan mendidik para kader dalam bentuk *tashwir al-afkar,* sebuah pertukaran gagasan. Ide ini kemudian mengkristal menjadi semacam kursus perdebatan untuk anak-anak muda dan kiai-kiai muda. Upaya ini didorong oleh semangat untuk kebangsaan umat Islam, yang salah satunya dilatari oleh kondisi Sarikat Islam (berdiri sejak 1912) yang sudah dicurigai oleh Belanda akibat kasus afdeling B sehingga banyak umat islam yang meninggalkan SI karena Belanda dimana-mana bisa menangkapi mereka yang dicurigai sebagai bagian dari pemberontakan SI Afdeling B.[[3]](#footnote-4) Setelah Itu selain KH. Wahab Hasbulloh muncullah tokoh-tokoh kiai yang mengusung tema perubahan bangsa dengan mendirikan *Syirkah al inan* bentukan dari 45 kiai diantaranya seperti KH.Hasyim Asy’ari dari Jombang, KH.Jusuf, KH.Usman dan Lain sebagainya. Dan sampai akhirnya kiai-kiai tersebut membentuk komite hijaz yang di gunakan kendaraan politik bagi masyarakat muslim pesantren untuk berunding dengan raja Arab Saudi yang pada waktu itu akan membongkar makam nabi Muhammad SAW. Dan juga pada kesempatan tersebut juga membentuk organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, yang pada dasarnya didirikan untuk menjawab tantangan globalisasi imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia diakukan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang.[[4]](#footnote-5) Para kiai juga mengeluarkan sebuah keputusan penting pada 10 nopember 1945 yang di kenal dengan resolusi jihad, untuk memerangi sekutu Inggris dan Belanda yang akan menduduki Indonesia setelah proklamasi di suarakan. Sampai pada tahun 1952 NU resmi didirikan sebagai partai pengikut pemilu pada tahun 1955. darisinilah NU terlibat langsung dengan arus politik praktis. Mengikuti segala bentuk percaturan politik dan pemerintahan. Sampai pada tahun 1971 Partai NU di lebur dengan partai Islam lainya menjadi PPP. Dan pada muktamar ke 26 tepatnya di Semarang NU memutuskan untuk kembali ke khittoh 1926 yang pada waktu itu NU di pimpin oleh KH. Idzam Khalid. Dan pada tahun 1999 partai yang berbasis NU berdiri yaitu PKB. Paratai ini selalu mengusung para kiai untuk berorasi dalam setiap kampanyenya. Dan sampai saat ini keikut-sertaan kiai dalam politik masih juga terasa.

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap pemilu. Alhasil, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan. Hampir di setiap partai politik, figur kiai menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dunia politik tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, bahkan seakan-akan, telah menjadi sesuatu yang harus direbut dan diraih. Kiai telah mendapatkan lahan garapan yang baru, setelah sebelumnya lebih banyak mengurus masalah pesantren dan masyarakat secara langsung, kini telah beralih mengurus dunia politik yang secara otomatis telah menyedot energi para kiai.[[5]](#footnote-6)

Kiai dalam setiap kali pemilu memperoleh perhatian para kontestan karena beberapa hal. Pertama, posisi kiai sebagai panutan umat beragama sangat potensial untuk mempengaruhi calon pemilih. Hubungan primordial di dunia pesantren menjadikan kiai di anggap mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing kontestan. Karena itu lahirlah anggapan bahwa siapa yang mampu menguasai kiai, merekalah yang akan menang. Kedua, para kiai sebelum terjadi re-strukturisasi format politik berafiliasi pada NU yang kemudian berfusi menjadi PPP. Keterikatan sementara kiai pada PPP amat kuat, apalagi pada NU. Membaca ikatan historis seperti itu layak jika kemudian posisi kiai sebagai pemuka umat diperhitungkan.[[6]](#footnote-7)

Selain faktor keilmuan, karakteristik yang kuat dalam diri kiai sebagai ciri khas kepribadianya, juga menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pengakuanya terhadap kapasitas dan kapabilitas kekiaianya. Dalam persepsi masyarakat Kediri (salah satu kabupaten dengan jumlah pondok terbanyak di Indonesia), sosok kiai adalah sosok yang segenap sifat-sifat dan karakter istimewa, yang membedakan antara kiai dengan masyarakat pada umumnya. Sifat istimewa ini melekat kuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kiai sehari-harinya. Inilah yang memperkokoh *Cognition* (pengakuan) masyarakat terhadah sosok kiai di Kediri.[[7]](#footnote-8)

Dalam kaitanya dengan pemaknaan politik, ada contoh kasus terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap politik di tubuh Nahdhatul Ulama, dalam dua perspektif yang bersifat kontradiktif. Dalam tataran visi, mereka ingin kembali ke kithah 1926, tetapi dalam tataran aksi, mereka malah terjun ke dalam kancah politik praktis. Ketika berdiri pada tahun 1926 di Surabaya, Nahdhatul ulama (NU) sebenarnya dimaksudkan sebagai organisasi ulama yang bergerak dibidang sosial keagamaan. Konsentrasi perjuangan dan kegiatan organisasipun berbentuk pada pengembangan masyarakat muslim Indonesia dalam lapangan sosial budaya seperti pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan pengembangan ekonomi umat. Dalam kerangka itulah, untuk kemudian, para ulama dan tokoh organisasi inipun merumuskan sebuah visi NU yang dikenal dengan kithah 1926[[8]](#footnote-9).

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik garis merah bahwa fakta NU selalu didasari oleh faham keagamaan, yakni Islam menurut faham Ahlussunah wal jama’ah yang dalam pandangan aqidah, fiqih, tasawuf berprinsip pada tawassuth dan i‘tidal, tasamuh, tawazun serta amar ma’ruf nahi munkar. dan prinsip ini kemudian melahirkan sikap perilaku sosial dan politik yang bercorak moderat, tidak ekstrim, fleksible, dan elastis sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi tanpa kehilangan identitasnya menurut doktrin yang diyakininya. Dalam bahasa yang lebih, bahwa teologi politik NU adalah teolog Ahlussunnah wal jama’ah.[[9]](#footnote-10)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran politik kiai sangatlah dominan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sehingga adanya sebuah tradisi politik seperti ini mencerminkan betapa seorang Kiai merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Khususnya para kiai yang berada di desa-desa yang mana dalam hal ini berada di dapil II kabupaten Tulungagung.

Maka dari konteks penelitian tersebut di atas, peneliti berkeinginan meneliti kasus politik kiai di kecamatan sumbergempol kabupaten Tulungagung. Yang penulis beri judul “**PERAN KIAI DALAM POLITIK (STUDI ATAS PEMENANGAN CALON LEGISLATIF OLEH KH.ARSYAD BUSHOIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”.**

1. **Fokus Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kiai dalam politik, Atas pemenangan calon legislatif.
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peran kiai dalam politik, atas pemenangan calon legislatif.
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang peran kiai dalam politik atas pemenangan calon legislatif.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap peran kiai dalam politik atas pemenangan calon legislatif.
3. **Kegunaan Penelitian**
4. KegunaanTeoritis

Sebagai pengembangan ilmu syariah didalam kajian fiqih siyasah yang di ajarkan di IAIN Tulungagung yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya merupakan masalah yang pada intinya mengkaitkan antara hukum Islam dengan peran seorang kiai terhadap pemenangan calon legislatif.

1. KegunaanPraktis
2. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung, tentang peran kiai dalam politik terhadap pemenangan calon legislatif dilihat dari perspektif hukum Islam.
3. Menghindari terjadinya salah pengertian dan salah penafsiran terhadap kiai yang melakukan aktifitas politik terhadap pemenangan calon legislatif.
4. Memberikan wacana kedepan supaya menjadikan kesinambungan sosial antara kiai, pesantren, caleg, dan masyarakat pada umumnya sehingga tidak terjadi isu-isu yang menyesatkan.
5. Memberi masukan kepada pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengadakan penelitian sejenis. Supaya sebagai landasan untuk berpijak dan akan lebih memudahkan pada hukum-hukum syariat Islam.
6. **Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Maka perlu adanya penegasan istilah.

1. Penegasan Konseptual
2. Peran Kiai dalam Politik: Fungsi dan tindakan seorang kiai dalam aktifitas politik yang juga dimaknai dengan terlibat dan berparisipasi dengan partai politik, sebagai ikhtiar untuk membangun penataan masyarakat secara efektif. Yang bersinggungan dengan Negara dan masyarakat. [[10]](#footnote-11)
3. Pemenangan Caleg: daya dan upaya dalam politik untuk memenangkan calon legislatif[[11]](#footnote-12).
4. Perspektif Hukum Islam: Tinjauan dari hukum Islam yang mengatur tentang politik atau ketatanegaraan yang dalam hal ini para ulama mengkajinya dalam fiqih siyasah, yang memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan.[[12]](#footnote-13)
5. PenegasanOperasional

Berangkat dari istilah yang penulis kemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa maksud dari peran kiai dalam politik atas pemenangan calon legislatif dalam perspektif hukum Islam studi menurut pengamatan terhadap realita yang ada, Adalah peran atau ke-ikutsertaan kiai dalam berpolitik terhadap Pemilu calon legislaif tahun 2014 untuk memenangkan salah satu caleg. ditinjau dari pandangan hukum Islam dan masyarakat umum.

1. **Sistematika Pembahasan**

Didalam sebuah karya Ilmiah adanya sistematika merupakan bantuan yang dapat mempermudah pembaca mengetahui urutan sistematika dari isi karya ilmiah tersebut.Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjai tiga bagian yaitu;yang pertama bagiaan primer, bagian ini terdiri dari halaman, judul, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian yang kedua adalah Bagian Teks atau isi, dimana bagian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi sub-sub antara lain sebagaiberikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini menguraikan tentang : konteks peneltian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang: Kriteria calon pemimpin, Peran rekomendasi otoritas kedamaian dalam pemilihan seorang pemimpin, Legislatif, Kiai

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan terkir adalah tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini mencangkup tentang: deskripsi singkat objek penelitian, kecamatan Sumbergempol, deskripsi hasil penelitian: KH. Arsyad Bushoiri, Bpk. Choirurrohim sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Pandangan Masyarakat umum: masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Analisis data: peran politik kiai dan perspektif hukum islam.

BabV Penutup

dimana didalam bab ini terdiri dari, kesimpulan dan saran

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari lampiran-lampiran dan kata penutup.

1. Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna*. (Yogya: Tiara Wacana, 1999), hal.246 [↑](#footnote-ref-2)
2. Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal.152 [↑](#footnote-ref-3)
3. Nur Khalik Ridwan, *NU dan BANGSA 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan.*(Jogjakarta: *AR-RUZZ MEDIA,* 2010), hal.33 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*…. hal.45 [↑](#footnote-ref-5)
5. Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hal.30 [↑](#footnote-ref-6)
6. Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*. (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), hal.174 [↑](#footnote-ref-7)
7. Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.140 [↑](#footnote-ref-8)
8. Zulfi Mubaroq, *Perilaku Politik Kiai Pandangan Kiai dalam Konspirasi Politik Era Gus Dur.* (Malang: UIN Maliki press, 2011), Hal.29 [↑](#footnote-ref-9)
9. Khari, *Islam dan Budaya Masyarakat*. (Purwokwerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), Hal. 118 [↑](#footnote-ref-10)
10. Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), hal.49. [↑](#footnote-ref-11)
11. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, diolah oleh pusat bahasa departemen pendidikan Nasional, edisi ke tiga. ( Jakarta:balai pustaka,2011), hal. 1212 [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hal.11. [↑](#footnote-ref-13)